

s e m b a r i m

Anda tentu tahu siapa itu Rendra. Tapi belum tentu Anda tahu atau ingat betapa tenarnya dramawan ini sekitar 20 tahun yang lalu. Sampul depan majalah paling tenar zaman itu, yakni *Tempo* (almarhum), bertubi-tubi diisi *close-up* atau karikatur wajahnya. Sulit menemukan tokoh budaya dan kesenian yang standart denganannya pada masa itu.

Salah satu karya teater paling sukses yang dipentaskan Rendra sekitar tahun 1975 adalah *Kisah Perjuangan Suku Naga*. Gengsinya tak kalah dengan film *Evita* yang kini sedang dipromosikan di mana-mana. Pada intinya, karya teater Rendra itu merupakan sebuah kritik mendasar terhadap proyek utama rezim-rezim di dunia ketiga, yakni pembangunan. Kritik Rendra lebih galak dan sekaligus lebih humoris ketimbang kritik Amien Rais tentang proyek pembangunan tambang emas tahun 1997.

Dalam sandiwara itu rakyat Suku Naga dijadikan tokoh pahlawan. Mereka tampil dalam busana tradisional Asia. Sedang para birokrat negara dan antek-antek asing mereka berperan sebagai lawan. Tokoh-tokoh ini tampil dalam busana resmi seperti jas dan dasi. Mereka juga suka pakai kacamata hitam, walau berada di dalam ruangan. Kalau Anda membuka-buka kembali koran atau majalah Indonesia dari tahun 1970-an, Anda akan segera tahu siapa yang diejek Rendra. Anda bisa paham mengapa penonton teater itu terpingkal-pingkal.

Tapi, soal baju ini bukan sekadar embel-embel di atas panggung pementasan. Salah satu adegan *Kisah Perjuangan Suku Naga* yang paling mengesankan berkaitan dengan komentar kepala suku Naga bernama Abisavam tentang baju para wakil rakyat. Pertemuan ketua parlemen dan rakyat suku Naga terjadi karena rakyat ini menolak penggusuran tanahnya yang akan dipakai untuk pembangunan mega-dollar. Ketua parlemen berkunjung ke daerah untuk membujuk rakyat yang tanahnya akan diserobot.

Dalam awal pertemuan itu Abisavam mempertanyakan mengapa sang ketua parlemen berbusana seperti *gangster* atau anggota parlemen dari Eropa sambil mengaku menjadi wakil rakyat. Kalau mereka berani-beraninya mengaku menjadi wakil rakyat seharusnya busana mereka mewakili busana rakyat. Tentu saja logika itu masih bisa kita teruskan sendiri dengan membandingkan perumahan mereka, makanan mereka, acara hiburan

Ariel Heryanto

mereka, kegelisahan, dan penghasilan rakyat. Jadi, bukan sekadar aspirasi mereka. Tapi itu di luar naskah pementasan.

Abisavam juga mengingatkan sang ketua parlemen bahwa rakyat adalah atasan dan majikan para anggota parlemen. Setiap kali menjelang diadakannya pemilu, adegan itu terngang kembali dalam ingatan saya. Alangkah bagusnya jika *Kisah Perjuangan Suku Naga* dipentaskan kembali, atau disineteronkan di seluruh antero negeri setiap akan ada pemilu. Mirip seperti pemutaran berkala film *Pengkhianatan G-30-S/PKI*. Apalagi pemilu tahun ini diawali oleh sejumlah 'operasi naga' yang suka makan rakyat.

Rendra lahir dan dibesarkan pada masa maraknya gelombang aktivisme generasi-bunga. Sebuah generasi yang secara global menolak keangkuhan modernisasi dan pembangunan dengan cara-cara antikekerasan. Mereka romantis terhadap alam (sebagai lawan industrialisasi) dan birokrasi negara yang pada masa itu di banyak negara dikuasai militer. Sebagai kaum muda kelas menengah yang terdidik, mereka fanatik berpihak kepada kaum jelata. Itulah zaman yang ditandai oleh berjayanya celana *blue jeans*, rambut gondrong, musik rock, dan revolusi seksual yang diwujudkan dalam bentuk hidup-bersama pacar di luar nikah.

Kini, tentu saja, Indonesia sudah punya tampang yang lain. Begitu juga Rendra sendiri. Para pejabat sekarang lebih suka memakai baju safari ketimbang jas dan dasi seperti *gangster* dalam film Hollywood. Sebagian pejabat kita yang lain, khususnya sejak 1990 dan yang wanita, gemar menggunakan busana dengan corak ke-Islam-an. Arus dan iklim politik mengharuskan mereka berpenampilan demikian, seperti halnya dulu

mereka mengubah lafal akhiran '-kan' menjadi '-ken'. Rendra sendiri kini semakin sering menggunakan jas dan dasi.

Bagaimana pun keadaan Indonesia sekarang, pada 20 tahun yang lampau Rendra berjasa membangkitkan kesadaran politik kaum kelas menengah dan bawah tentang proses pembangunan yang melanda bangsa ini secara besar-besaran. Ia juga menyadarkan banyak pihak tentang kekuatan sebuah karya seni dalam berinteraksi dengan masyarakatnya.

Dalam zaman de-politisasi yang dirancang Komando Operasi Pemulihara Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), karya-karya teater seperti itu menjadi begitu penting.

Saya teringat sebuah pengalaman kecil dari masa 20 tahun yang lewat. Suatu kali saya melewati kampus yang punya jalan tembus menuju kampung tempat tinggal saya. Siang itu hujan deras, saya jalan berpayung, jalan-jalan masih menyimpan genangan air. Tiba-tiba saya mendapat teguran dari seorang teman sekolah yang sudah jadi dosen. Dengan sedikit bergurau dan mengejek ia mendamprat saya karena melewati kampus memakai sandal jepit dan menggulung ujung celana agar tidak kuyup genangan air hujan. Ia menuduh saya ikut-ikutan berpenampilan seperti *hippies bule* dari California yang keluyuran dengan tampang sembarangan di pusat-pusat turisme seperti Yogyakarta dan Bali.

Turis California? "Ini orang belum kenal 150 juta rakyat Indonesia!" Begitu saya membantah pada teman yang gandrung pakai baju safari. "Buka mata kamu dan lihat di sepanjang jalan di situ. Bertahun-tahun rakyat Indonesia pakai sandal jepit. Sebagian menggulung celananya kalau hujan. Yang lain bertelanjang dada bila sedang bekerja. Mereka tak pernah ke California, jadi turis atau *hippies*. Pernah lihat nggak? Sejauh-jauh mata kamu memandang, yang kelihatan cuma turis asing."

BAJU W





Tanggapan seperti ini benar-benar tak terduga. Saya tak siap menjawab dengan blak-blakan dan tanda. Baru dalam perjalanan pulang, saya bisa menguras umpatan dalam batin. Sialan! Sudah pakai baju yang terbagus, masih disalahkan. Sudah menerima undangan berceramah, mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang perlu dengan isi ceramah itu. Dan yang paling serius: busana para anggota parlemen ini bukan saja tidak mewakili busana rakyat, mereka masih berani-beraninya menuntut rakyat berbusana sesuai selera mereka! Sebagai bagian dari 'rakyat', saya merasa berhak, walau tidak meminta dihormati macam-macam. Tapi, yang absurd, mereka itu menuntut dihormati, karena mengaku mewakili rakyat!

Kini, emosi seperti itu merupakan reaksi konyol yang saya tertawakan sendiri. Tentu saja bapak-bapak parlemen itu berbuat demikian karena ada sebabnya. Mereka ibarat tanaman yang bertumbuh subur dalam lingkungan yang membentuk mereka berwatak seperti itu.

Tidak sulit menelusuri sejarah terbentuknya arogansi birokrat parlemen yang merasa menjadi atasan atau majikan bagi rakyat tanpa rasa menyandang gelar resmi sebagai wakil rakyat. Bila mereka lewat sebuah jalan, rakyat diharapkan menggiring dan membungkuk. Bukan sebaliknya.

Kini, saya pun sadar bahwa pada waktu mengisi acara penataran ikut terbentuk oleh lingkungan yang sama. Mengapa saya memilih pakaian yang terbaik ke pertemuan itu? Itu salah saya sendiri. Kan saya tidak akan bertemu dengan seorang atasan, atau majikan. Saya bertemu dengan orang yang mewakili saya, bawahan saya. Seharusnya saya berbusana biasa-biasa saja, seperti yang diajarkan Abisavam.

Pengalaman kecil itu memberikan lebih banyak pelajaran bagi saya ketimbang

AKIL RAKYAT

Mungkin sudah nasib saya sebagai rakyat yang didamprat orang lain karena busana yang saya pakai. Beberapa tahun yang lalu, saya kena dampratan serupa. Istimewanya, dampratan kali ini datang dari wakil rakyat. Ceritanya, saya mendapat undangan menjadi salah seorang narasumber dalam sebuah penataran untuk para anggota parlemen daerah tingkat satu. Jangan tanya mengapa saya dipilih untuk ikut berbicara di situ. Saya sendiri heran dan tak habis mengerti. Karena belum pernah berbicara di hadapan para pejabat negara seperti itu, saya berusaha tampil sebaik-baiknya. Saya memilih materi ceramah yang saya anggap cukup kontroversial tetapi dengan persiapan sematang mungkin dan berhati-hati. Saya berangkat ke tempat pertemuan dengan memakai pakaian terbagus yang saya miliki. Sesudah uraian saya berakhir, tiba-tiba acara tanya-jawab dan diskusi. Acara yang bisa mengasyikkan, bisa juga mendebarkan.

Saya menanti gugatan yang keras atas pemaparan gagasan-gagasan saya yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah. Memang tidak sedikit yang langsung angkat tangan dan menggugat saya. Tapi tidak ada satu pun yang mempersoalkan materi dalam uraian ceramah saya. Mungkin mereka sama sekali tidak tertarik dengan apa yang saya bahas. Mungkin uraian saya dianggap omong kosong belaka.

Sebagian terbesar dari penanya mempersoalkan penampilan saya. Secara lebih rinci mereka mempersoalkan lengan-panjang baju saya yang tergulung sedikit di dekat pergelangan tangan. Mereka mempersoalkan ujung bawah baju saya yang tidak dimasukkan ke dalam celana. Mereka lebih tersinggung menyaksikan kancing teratas baju saya yang tidak tertutup. Semua ini dianggap merupakan pelanggaran terhadap dua hal. Pertama, cara berbusana itu dianggap tidak nasionalis. Kedua, hal yang sama dianggap tidak menghormati bapak-bapak anggota DPRD yang hampir semuanya berbusana safari.

apa yang dapat saya tawarkan dalam ceramah kepada mereka. Ia menyadarkan saya, sebagai rakyat Indonesia saya tidak mengenal watak dan selera para pejabat yang mengaku menjadi wakil rakyat. Persis sebagaimana mereka juga tidak mengenal watak dan selera rakyat yang diklaim diwakilinya. Persoalannya, apakah ada kewajiban yang sama beratnya bagi kedua pihak untuk saling mengenal dan menghormati? Baik secara teori normatif maupun praktik, jawabnya adalah: tidak.

Secara normatif, seharusnya seorang wakil lebih berkewajiban mengerti dan menghormati pihak yang diwakilinya, yang menjadi atasannya. Bukan sebaliknya. Namun dalam praktik, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka merasa mereka lah atasan kita. Di republik ini rakyat seringkali ditempatkan bukan sebagai pemilik negeri ini dan pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat diberi status seperti kawula di kerajaan-kerajaan dari beberapa abad yang lampau. Rakyat adalah makhluk-makhluk yang menumpang tempat hidup di negeri milik para raja, keluarganya, serta sejumlah hulu-balang kerajaan.

Karena bukan pemilik negeri dan kedaulatan tertinggi, rakyat tidak merdeka berbuat apa pun. Ia harus meminta-minta izin, misalnya jika ingin bicara sesuai hati nurani atau merayakan ulangtahun organisasinya. Dan tentu saja tidak ada jaminan apa yang diminta itu akan diberikan oleh sang paduka. Rakyat yang menolak status semacam itu dan bertingkah seakan-akan sebagai warganegara yang merdeka dan pemilik kedaulatan tertinggi di negeri ini bisa terancam kena... gebug!

Ariel Heryanto, mantan dosen Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, kini mengajar di National University of Singapore